



BAB I

PENDAHULUAN

1.A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan ekonomi saat ini, ada beberapa hal tidak bisa dihindari oleh semua Negara termasuk juga Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap terlibat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, menghindari salah alokasi dana investasi dan mencegah korupsi politik dan administrasi. Tata kelola yang baik memiliki beberapa elemen diantaranya adalah : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi di dasarkan pada kebebasan mengakses informasi, baik secara online maupun offline. Partisipasi melibatkan masyarakat yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui badan perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjanya dalam satu periode kepada masyarakat desa setempat.

Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi ini berarti adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu memberdayakan diri melalui pengelolaan pembangunan, menumbuhkan kreativitas, menciptakan inovasi, serta meningkatkan kemandirian sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir. Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus mempermudah pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (Huda, 2022)

Pemerintah desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur dan mengukur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya, maka diterbitkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal. Dari beberapa pengertian maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa yang diatur menurut undang-undang, serta mengatur dan mengurus masyarakat di desa dalam membangun pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah desa juga merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada kepala desa. Pemerintah desa merupakan suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dalam hal ini merupakan kepala desa yang dibantu perangkat desa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi segala hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat setempat.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menuju sistem desentralisasi, yakni dari dominasi pemerintah pusat beralih ke kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, maupun hak-hak tradisional yang diakui dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pengelolaan Keuangan dan Dana Desa diatur lebih ketat agar lebih transparan dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.(3. *Pj. Gub. Jatim, Kab. Tuban.Pdf*, n.d.)

Keuangan merupakan aspek terpenting dalam bidang apapun begitu pula dengan Analisis Kinerja keuangan Desa. Dalam hal ini Analisis Kinerja Keuangan Desa melibatkan pemahaman tentang pentingnya keuangan desa dalam pengelolaan dan penyediaan layanan *public* bagi masyarakat



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

setempat. Desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengelola keuangan yang dimilikinya. Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas-batas yang diterapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Huda, 2022)

Kegunaan analisis kinerja keuangan dalam APBDes adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan yang terjadi. Selanjutnya, ada pula hal yang dapat dilakukan yakni dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa yang tidak mampu di tingkatkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengatur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang diterapkan. Pengukuran kinerja keuangan penting untuk dilakukan untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah desa, realisasi anggaran serta menunjukkan keterbukaan atas



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sumberdaya yang dikelola pemerintah desa.(Saleh, 2022)

Dengan demikian penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas bukan hanya sekedar menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien yaitu penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan *output* yang maksimal, efektif merupakan penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, kemudian ekonomis yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Anggaran digunakan oleh pemerintah desa untuk mengarahkan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan kebutuhan tersebut terus menerus berkembang. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBDes yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio ini digunakan untuk tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan desa, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan desa, mengukur kontribusi sumber pendapatan dalam pembentukan desa, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan



selama priopde tertentu,(Saleh, 2022)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi Pada Pemerintah Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri)”**.

1.B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah di dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri ?

1.C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri pada Tahun Anggaran 2021–2024.

1.D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya terkait pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan sumber pengetahuan



bagi peneliti berikutnya yang berminat mengkaji tema serupa.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dan latihan dalam melakukan penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti serta menjadi wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, serta informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, maupun lembaga masyarakat lainnya. Informasi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai peran dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, sekaligus menjadi acuan dalam menilai hasil kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa.



1.E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran serta Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Desain Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Populasi Dan Sampel, Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel, Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan Dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN